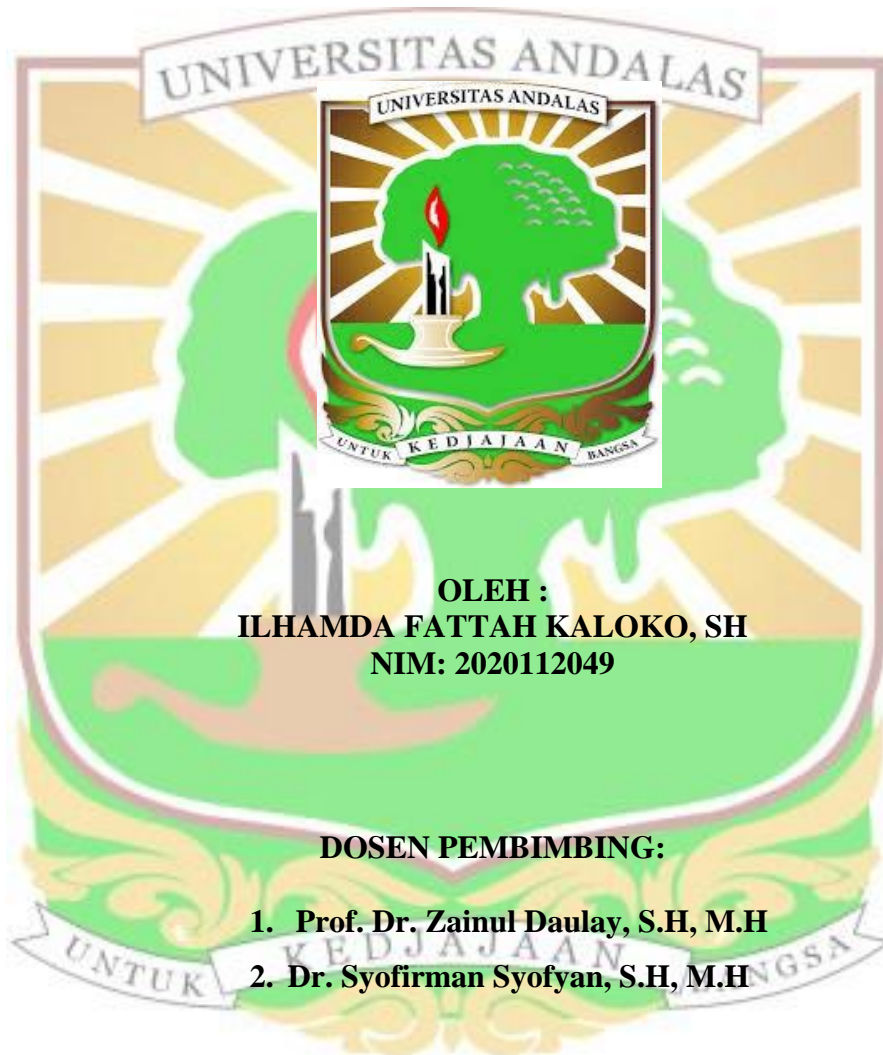


DRAFT TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
PERANG ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA DI JALUR GAZA:
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



OLEH :
ILHAMDA FATTAH KALOKO, SH
NIM: 2020112049

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H, M.H**
- 2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H, M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2022**

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELANGGARAN HUKUM PERANG ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA DI JALUR GAZA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

(Ilhamda Fattah Kaloko, 2020112049, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 213 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Perseteruan dan konflik terjadi di dunia merupakan dinamika yang terjadi dan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara. Konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi, namun realisasi pertanggungjawaban secara internasional belum sesuai dengan aturan yang ada. Adanya peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa dalam perang tersebut mesti dipertanggungjawabkan oleh Israel sebagai Negara, juga individu yang terlibat. Akibat tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana tanggung jawab Negara Israel atas pelanggaran hukum perang? (2) Bagaimana tanggung jawab individual pihak Israel terhadap Palestina atas pelanggaran hukum perang?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Tidak ada tanggung jawab Negara Israel atas pelanggaran hukum perang, dari setiap pelanggaran hukum internasional Israel tetap bebas dari hukuman, tentunya hal ini terkait dengan politik internasional yang dinilai sangat tidak manusiawi. Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, maka ICC tentunya tidak akan bisa memproses kasus kejahatan perang yang dilakukan Israel, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pada Israel atas pelanggaran hukum perang tersebut. Agar terlaksananya penegakan hukum humaniter internasional bagi para pelaku kejahatan perang maka dapat dilakukan melalui *Internationally Wrongful Acts*, dapat diwujudkan dengan melakukan reparasi penuh untuk kerugian bisa berupa restitusi, kompensasi dan *satisfaction*, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi. (2) Konflik Israel-Palestina sudah memenuhi unsur-unsur sebuah kejahatan internasional, sudah selayaknyalah para individu yang telah melakukan hal tersebut dapat dihukum. Namun dalam kasus pelanggaran ini Israel dianggap *unwilling* dan *unable* dalam menangani kasus tersebut maka seharusnya PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan *ad hoc* agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan pelaku dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelanggaran Hukum Perang, Israel Dan Palestina, Perspektif Hukum Internasional.

**RESPONSIBILITY AGAINST VIOLATIONS OF WAR BETWEEN
ISRAEL AND PALESTINE ON THE GAZA LINE:
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES**

*(Ilhamda Fattah Kaloko, 2020112049, Master of Law Study Program,
Faculty of Law, Andalas University, 213Page, 2022)*

ABSTRACT

Feuds and conflicts that occur in the world are dynamics that occur and things that cannot be avoided by the state. Conflicts between Israel and Palestine occur repeatedly, but the realization of international accountability has not been in accordance with existing rules. The existence of events that resulted in casualties in the war must be accounted for by Israel as a State, as well as the individuals involved. As a result of this action, the perpetrators of war crimes must be held accountable under international law. The formulation of the problem (1) What is the responsibility of the State of Israel for violations of the laws of war? (2) What is the individual responsibility of the Israeli side towards Palestine for violating the laws of war?. The conclusions of this research are: (1) There is no responsibility of the State of Israel for violations of the laws of war, from every violation of international law Israel remains free from punishment, of course this is related to international politics which is considered very inhumane. Israel has not ratified the Rome Statute, so the ICC certainly will not be able to process cases of war crimes committed by Israel, making it difficult to hold Israel accountable for violations of the laws of war. In order for the implementation of international humanitarian law enforcement for perpetrators of war crimes, it can be carried out through Internationally Wrongful Acts, it can be realized by carrying out full reparations for losses in the form of restitution, compensation and satisfaction, either separately or in combination. (2) The Israeli-Palestinian conflict has fulfilled the elements of an international crime, it is proper that individuals who have committed this should be punished. However, in this violation case, Israel is considered unwilling and unable to handle the case, so the UN should have the right to urge the security council to establish an ad hoc court so that the case can be resolved and the perpetrators can be held accountable for their actions.

Keywords: *Liability, Violation of the Law of War, Israel and Palestine, International Law Perspective.*